



## AKSELERASI PENGISIAN DAN VALIDASI DATA LAPORAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DI BPKAD KE DALAM PORTAL SATU DATA SUMATERA SELATAN

Ahmad Tri Wahyudi<sup>1</sup>, Muhammad Nasir<sup>2</sup>, Jemakmun<sup>3</sup>, Andri<sup>4</sup>

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bina Darma  
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, 30264

\*Penulis Korespondensi: <sup>1</sup>[Ahmadtriwahyudi26@gmail.com](mailto:Ahmadtriwahyudi26@gmail.com)

**Abstract.** *This community service article describes the acceleration process of inputting and validating Key Performance Indicator (IKK) data at the Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) of South Sumatra Province into the South Sumatra One Data Portal. BPKAD, as the steward of IKK 4.b.3, faces challenges in ensuring the accuracy, validity, and timeliness of budget realization data for Mandatory Basic Public Service expenditures. The implementation of this service activity was carried out through data collection assistance from financial systems (SIMDA and SIPD), cross-data validation assistance, Microsoft Excel-based data processing, and data upload into the One Data Portal using electronic signatures certified by BSR-E-BSSN. The service activities resulted in IKK 4.b.3 achievement of 76.98% with a budget realization of IDR 4,037,023,860,288.94 from an allocation of IDR 5,244,085,538,092.00 for Fiscal Year 2025. This program improved data quality, accelerated reporting timelines, and enhanced accountability in regional government performance data management. The activity also contributed to strengthening the implementation of the One Data Indonesia policy at the provincial level.*

**Keywords:** *Key Performance Indicator; One Data Indonesia; data validation; accountability; BPKAD.*

**Abstrak.** Artikel pengabdian ini mendeskripsikan proses akselerasi pengisian dan validasi data Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan ke dalam Portal Satu Data Sumatera Selatan. BPKAD selaku pengampu IKK 4.b.3 menghadapi tantangan dalam memastikan akurasi, validitas, dan ketepatan waktu penyajian data realisasi anggaran belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui pendampingan pengumpulan data dari sistem keuangan (SIMDA dan SIPD), pendampingan validasi data silang, pengolahan data berbasis Microsoft Excel, serta pengunggahan data ke Portal Satu Data menggunakan tanda tangan elektronik bersertifikat BSR-E-BSSN. Hasil kegiatan menunjukkan capaian IKK 4.b.3 sebesar 76,98% dengan realisasi anggaran Rp4.037.023.860.288,94 dari alokasi Rp5.244.085.538.092,00 Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini meningkatkan kualitas data, mempercepat ketepatan waktu pelaporan, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan data kinerja pemerintah daerah. Kegiatan juga berkontribusi dalam memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat provinsi.

**Kata Kunci:** Indikator Kinerja Kunci; Satu Data Indonesia; validasi data; akuntabilitas; BPKAD.

## **1. PENDAHULUAN**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut tersedianya data kinerja pemerintah daerah yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan Satu Data Indonesia, yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, mengamanatkan bahwa seluruh data pemerintah harus memenuhi standar data, metadata baku, interoperabilitas, serta dikelola dan dibagipakaikan melalui portal satu data di tingkat pusat maupun daerah (Utama, 2020). Di tingkat provinsi, kebijakan ini diwujudkan melalui Portal Satu Data Sumatera Selatan sebagai wadah konsolidasi data lintas organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk data kinerja seperti Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam penyusunan dan penginputan data IKK 4.b.3, yaitu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (UWPD) terhadap Total Belanja APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah provinsi mengalokasikan dan merealisasikan anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat, meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta urusan sosial (Sofyani & Akbar, 2013).

Pengelolaan data IKK yang valid dan tepat waktu merupakan prasyarat penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang akuntabel (“Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar,” 2023). Data LPPD yang tersaji secara akurat pada portal satu data mencerminkan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah dan menjadi dasar evaluasi kinerja oleh pemerintah pusat (Nasution & M.Si, 2021). Namun demikian, proses penginputan data dari sistem keuangan daerah ke dalam Portal Satu Data Sumatera Selatan kerap mengalami keterlambatan dan inkonsistensi, sehingga diperlukan upaya akselerasi sekaligus mekanisme validasi yang memadai.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan daerah terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data keuangan dan kinerja. Sistem seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(SIPD) berperan penting dalam mengotomasi pelaporan keuangan sesuai regulasi (Arif & Firmansyah, 2024; Vitriana & Ahyaruddin, 2022). Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan juga mendorong perlunya integrasi antarsistem yang lebih seamless agar data yang disajikan pada portal satu data mencerminkan kondisi riil realisasi anggaran secara real-time (Tulungen et al., 2022; Manik & Juwono, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan menganalisis proses akselerasi pengisian dan validasi data IKK BPKAD ke dalam Portal Satu Data Sumatera Selatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mendokumentasikan upaya perbaikan yang telah dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendampingan langsung kepada pengelola data IKK di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dengan memanfaatkan alat bantu teknologi informasi yang tersedia.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses akselerasi pengisian dan validasi data IKK BPKAD ke dalam Portal Satu Data Sumatera Selatan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kegiatan adalah menggambarkan proses pelaksanaan pendampingan, keterlibatan pengelola data, serta dampak awal terhadap kualitas dan ketepatan waktu pelaporan data kinerja pemerintah daerah (Praditya, n.d.).

Lokasi kegiatan adalah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51, Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan pengabdian berlangsung selama kurang lebih dua bulan pada masa penyusunan LPPD Tahun 2025, yaitu pada periode Januari hingga Maret 2026. Mitra kegiatan adalah pegawai BPKAD yang secara langsung menangani penyusunan dan penginputan data IKK 4.b.3.

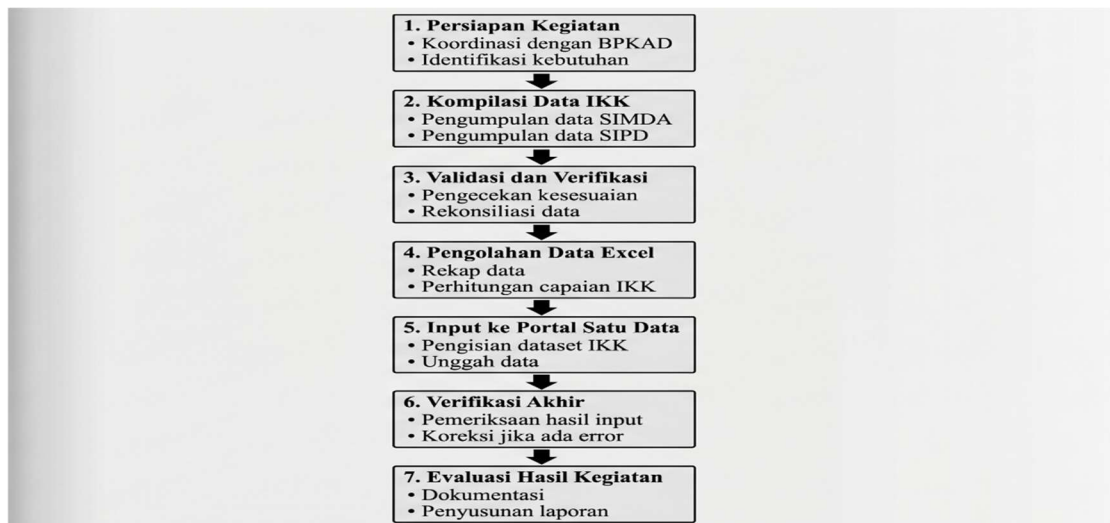
### **A. Tahapan Persiapan Kegiatan**

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi awal dengan pihak BPKAD Provinsi Sumatera Selatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendampingan dalam pengisian dan validasi data IKK. Pada tahap ini dilakukan pula pemahaman terhadap regulasi terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai landasan kegiatan (Lantu et al., 2023).

## **B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan pendampingan mencakup tujuh tahapan utama:

1. Pendampingan kompilasi data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari sistem keuangan SIMDA dan SIPD.
2. Pendampingan verifikasi dan rekonsiliasi data per urusan dengan dokumen APBD/APBD-P.
3. Pengolahan dan penyusunan data menggunakan Microsoft Excel.
4. Pendampingan pengisian data ke dalam Portal Satu Data Sumatera Selatan.
5. Pendampingan validasi dan autentikasi dokumen menggunakan tanda tangan elektronik bersertifikat BSR-E-BSSN.
6. Dokumentasi setiap tahapan kegiatan sebagai bahan pelaporan.
7. Evaluasi hasil kegiatan bersama pengelola data BPKAD.



**Gambar 1. Diagram Alur Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian**

*Sumber: Dokumentasi Kegiatan Pengabdian (2025).*

## **C. Tahapan Evaluasi**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui analisis kualitas data yang berhasil diinput ke Portal Satu Data Sumatera Selatan, kesesuaian data dengan dokumen sumber, serta ketepatan waktu pemenuhan laporan IKK. Data yang diperoleh dari proses evaluasi selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kondisi Awal Pengelolaan Data IKK**

BPKAD Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah. Dalam struktur tata kelola keuangan daerah, BPKAD berperan sebagai koordinator yang mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan APBD, penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengelolaan aset daerah. Sebagai pengampu IKK 4.b.3, BPKAD menerbitkan Surat Keterangan Data dan Perhitungan IKK 4.b.3 Nomor 900.1.5/01433/BPKAD-I/2026 tertanggal 11 Maret 2026 sebagai dasar formal data yang diinput ke Portal Satu Data Sumatera Selatan.

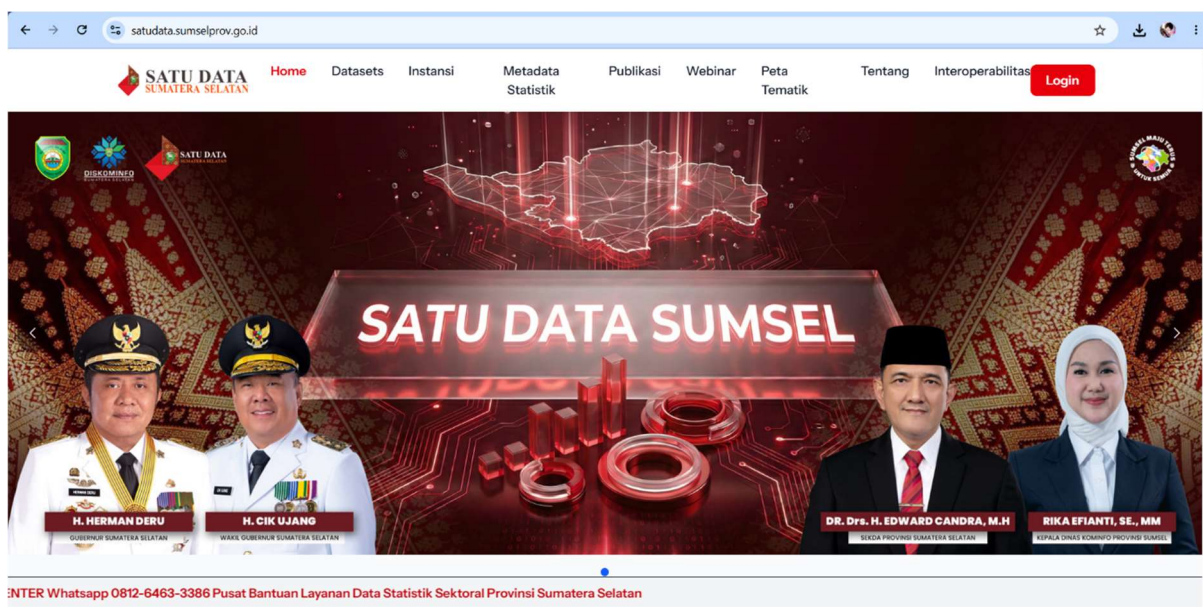
Kondisi awal sebelum pelaksanaan kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa proses pengisian data IKK masih menghadapi tantangan, yaitu rekonsiliasi yang memerlukan waktu lama akibat data tersebar pada puluhan OPD, risiko inkonsistensi data antara sistem keuangan dan portal, serta belum meratanya pemahaman pengelola data di tingkat OPD mengenai tata cara pengisian yang benar (Irda et al., n.d.).

#### **3.2 Pendampingan Pengisian Data pada Portal Satu Data**

Kegiatan pendampingan pengisian data IKK dilakukan melalui kompilasi data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diekstrak dari SIMDA dan/atau SIPD, mencakup rincian realisasi hingga level sub kegiatan pada masing-masing OPD. Data tersebut kemudian dipetakan per urusan dan per OPD menggunakan aplikasi Microsoft Excel sebelum diinput ke dalam portal sesuai struktur dan format data yang ditetapkan oleh Portal Satu Data Sumatera Selatan (Arif & Firmansyah, 2024).

Proses pendampingan ini juga menekankan standarisasi format data antar-OPD, mulai dari penyeragaman struktur kode rekening, satuan nilai, hingga periode pelaporan, sebelum data diunggah ke portal. Standarisasi tersebut penting untuk menjamin sinkronisasi data lintas sistem dan memperkuat kolaborasi antarunit kerja dalam ekosistem pemerintahan elektronik daerah (Rozikin et al., 2020).

## **AKSELERASI PENGISIAN DAN VALIDASI DATA LAPORAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DI BPKAD KE DALAM PORTAL SATU DATA SUMATERA SELATAN**



**Gambar 2. Tampilan Portal Satu Data Sumatera Selatan**

*Sumber: Dokumentasi Kegiatan Pengabdian (2025).*

Berdasarkan Surat Keterangan BPKAD Nomor 900.1.5/01433/BPKAD-I/2026, hasil perhitungan IKK 4.b.3 Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan realisasi anggaran belanja UWPD sebesar Rp4.037.023.860.288,94 dari alokasi Rp5.244.085.538.092,00, setara dengan capaian IKK 4.b.3 sebesar 76,98%. Data ini disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Hasil Perhitungan IKK 4.b.3 Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025**

| Komponen                                   | Nilai                  |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Realisasi Anggaran Belanja UWPD Tahun 2025 | Rp4.037.023.860.288,94 |
| Alokasi Anggaran Belanja UWPD Tahun 2025   | Rp5.244.085.538.092,00 |
| Capaian IKK 4.b.3                          | 76,98%                 |

*Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan (2026).*

### **3.3 Pendampingan Validasi dan Verifikasi Data**

Kegiatan pendampingan validasi data dilakukan melalui verifikasi silang antara data hasil kompilasi dengan dokumen APBD/APBD-P berdasarkan kode urusan, kode OPD, kode program, dan kode kegiatan. Proses ini memastikan konsistensi antara data yang diinput ke portal dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Sofyani & Akbar, 2013). Penguatan validasi silang ini sejalan dengan prinsip pengendalian kualitas data dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang menegaskan bahwa akurasi data administratif menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya

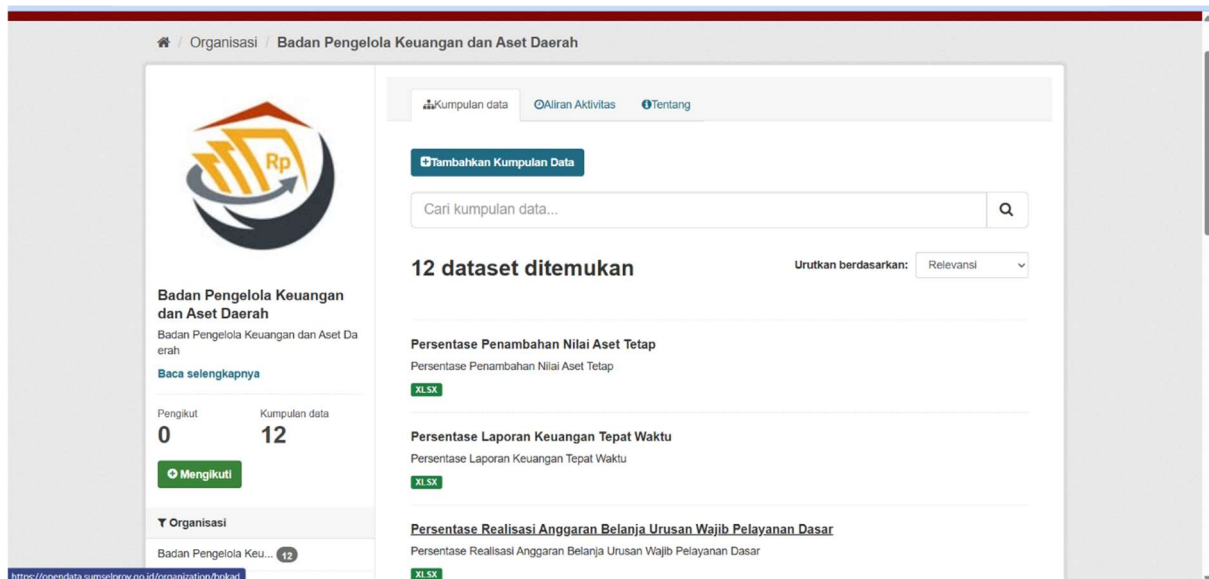
tata kelola pemerintahan yang baik (Rusdy & Flambonita, 2023). Semakin ketat proses validasi yang dilaksanakan, semakin tinggi pula tingkat keandalan data yang disajikan kepada publik melalui portal satu data. Tabel 2 menyajikan rincian capaian realisasi anggaran per urusan yang menjadi unit data terkecil yang divalidasi sebelum dikonsolidasikan ke portal.

**Tabel 2. Rincian Realisasi Anggaran Belanja UWPD per Urusan Tahun Anggaran 2025**

| No | Urusan                          | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)              | Capaian (%)  |
|----|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1  | Pendidikan                      | 2.868.880.713.669        | 1.927.831.780.788,50        | 67,20        |
| 2  | Kesehatan                       | 1.112.028.357.267        | 1.046.768.727.300,00        | 94,13        |
| 3  | Pekerjaan Umum & Penataan Ruang | 1.059.723.354.883        | 879.918.460.404,00          | 83,03        |
| 4  | Perumahan & Kawasan Permukiman  | 100.281.183.479          | 87.082.905.321,00           | 86,84        |
| 5  | Trantibum & Linmas              | 62.095.549.892           | 57.871.214.192,00           | 93,20        |
| 6  | Sosial                          | 41.076.378.902           | 37.550.772.283,44           | 91,42        |
|    | <b>TOTAL</b>                    | <b>5.244.085.538.092</b> | <b>4.037.023.860.288,94</b> | <b>76,98</b> |

*Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan (2026).*

Urusan kesehatan mencatat capaian tertinggi sebesar 94,13%, sedangkan urusan pendidikan mencatat capaian terendah sebesar 67,20%. Rendahnya capaian pendidikan disebabkan oleh besarnya proporsi anggaran yang mencakup belanja gaji ASN, dana BOS, dan investasi infrastruktur sekolah dengan siklus pencairan panjang. Variasi capaian antarurusan ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses validasi data, karena setiap angka yang tidak konsisten dengan dokumen sumber berpotensi menimbulkan pertanyaan pada saat verifikasi oleh pemerintah pusat maupun audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Lantu et al., 2023).



**Gambar 3. Tampilan Dataset pada Portal Satu Data Sumatera Selatan**

*Sumber: Dokumentasi Kegiatan Pengabdian (2025).*

### **3.4 Pemanfaatan Microsoft Excel dalam Pengelolaan Data**

Microsoft Excel dimanfaatkan sebagai alat bantu utama dalam proses kompilasi, rekonsiliasi, dan pengolahan data IKK sebelum diinput ke portal. Data Laporan Realisasi Anggaran dari SIMDA dan SIPD diekstrak dalam format spreadsheet, kemudian dilakukan pemetaan kode rekening per urusan dan per OPD secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi inkonsistensi data yang lebih cepat dibandingkan pengelolaan manual berbasis dokumen fisik (Vitriana & Ahyaruddin, 2022).

Dalam kegiatan pengabdian ini, pendampingan pengolahan data menggunakan Excel dilakukan melalui pembuatan template rekap data per urusan yang terstruktur, penggunaan formula untuk perhitungan otomatis persentase capaian per OPD, serta pemberian warna-kode (color coding) untuk menandai data yang memerlukan verifikasi lebih lanjut. Metode ini terbukti efektif dalam mempercepat proses rekonsiliasi yang sebelumnya memerlukan waktu berminggu-minggu (Arif & Firmansyah, 2024). Penggunaan template dan formula otomatis tersebut juga menekan potensi kesalahan input manual sekaligus meningkatkan efisiensi kerja tim pengelola data, sejalan dengan temuan bahwa kolaborasi berbasis teknologi informasi dapat memperkuat keberhasilan inovasi pemerintahan elektronik daerah (Rozikin et al., 2020).

| 1 | Tahun | Nama_Indikator                                                     | capaian | Satuan |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 2 | 2025  | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar | 76,98   | persen |

**Gambar 4. Pengolahan Data IKK Menggunakan Microsoft Excel**

*Sumber: Dokumentasi Kegiatan Pengabdian (2025).*

### 3.5 Manfaat Portal Satu Data dalam Mendukung Keterbukaan Informasi

Portal Satu Data Sumatera Selatan berfungsi sebagai wadah tunggal penyimpanan dan penyajian data dari seluruh OPD, termasuk data keuangan dan kinerja, sehingga dapat diakses publik dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Kebijakan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menegaskan empat prinsip utama: penggunaan standar data, metadata baku, interoperabilitas data, dan penggunaan kode referensi atau data induk yang sama (Utama, 2020).

Melalui kegiatan pengabdian ini, data IKK 4.b.3 yang telah tervalidasi berhasil diinput ke dalam portal dengan menggunakan struktur dan format data yang ditetapkan. Proses autentikasi dilakukan melalui tanda tangan elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik menjamin integritas dokumen, mempercepat proses pengesahan, dan mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan (Manik & Juwono, 2024). Keterbukaan data pada portal ini turut memperkuat akuntabilitas publik dan menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat daerah, karena data kinerja yang valid dan mudah diakses mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan (Rusdy & Flambonita, 2023).

### 3.6 Evaluasi Hasil Kegiatan

Akselerasi pada tahapan kompilasi dan verifikasi data memberikan dampak paling signifikan terhadap kecepatan keseluruhan proses pelaporan. Rekonsiliasi yang sebelumnya memerlukan waktu berminggu-minggu dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat berkat pendampingan yang sistematis dan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal (Tulungen et al., 2022).

Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ditemukan selama pelaksanaan kegiatan, yaitu: (1) integrasi data antarsistem yang belum sepenuhnya seamless antara SIMDA, SIPD, dan Portal Satu Data, sehingga sebagian proses ekstraksi dan transformasi data masih dilakukan secara manual; (2) variasi kapasitas sumber daya manusia teknologi informasi antar-OPD, yang menyebabkan kualitas dan kecepatan input data tidak seragam; (3) perubahan kode rekening akibat perubahan regulasi yang menyulitkan rekonsiliasi data historis; dan (4) keterbatasan infrastruktur internet di beberapa lokasi UPTD di daerah terpencil yang menghambat pembaruan data secara real-time (Nasution & M.Si, 2021). Tantangan serupa juga banyak ditemukan pada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di berbagai daerah lain, khususnya terkait keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya integrasi sistem, dan kesenjangan kapasitas sumber daya manusia (Arief & Abbas, 2021; La Adu et al., 2022).

BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah merespons tantangan tersebut melalui bimbingan teknis berkala, forum koordinasi rutin dengan OPD, pengembangan standar operasional prosedur (SOP) digital, dan penguatan infrastruktur jaringan. Upaya ini menunjukkan bahwa akselerasi data kinerja ke dalam portal satu data daerah memerlukan sinergi antara penguatan sistem teknologi informasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan (Manik & Juwono, 2024).

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian berupa pendampingan akselerasi pengisian dan validasi data IKK di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan ke dalam Portal Satu Data Sumatera Selatan telah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan mencakup pendampingan kompilasi data dari sistem keuangan daerah (SIMDA dan SIPD), verifikasi dan rekonsiliasi data per urusan, pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, penginputan data ke portal, serta autentikasi dokumen melalui tanda tangan elektronik bersertifikat BSrE-BSSN.

Tantangan utama yang masih dihadapi meliputi integrasi antarsistem yang belum optimal, variasi kapasitas SDM TI antar-OPD, perubahan kode rekening, dan keterbatasan infrastruktur jaringan di daerah terpencil. Untuk mengatasi hal tersebut, disarankan agar kegiatan pendampingan serupa dilakukan secara berkala dengan cakupan yang lebih luas, termasuk kajian mendalam mengenai potensi penerapan application

programming interface (API) untuk mengotomasi proses transfer data antara SIMDA, SIPD, dan Portal Satu Data Sumatera Selatan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, serta kepada seluruh pegawai yang telah bersedia berbagi informasi dan berkolaborasi dalam pendampingan pengelolaan data IKK. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Bina Darma Palembang atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). (2023). Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 4(1).
- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, 8(1).
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 3(1).
- Irda, W. A., Hidayatul, R., & Politeknik Negeri Padang. (n.d.). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Politeknik Negeri Padang. Jurnal Administrasi Publik.
- La Adu, A., Hartanto, R., & Fauziati, S. (2022). Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintahan Daerah. JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer), 5(3), 215-223. <https://doi.org/10.33387/jiko.v5i3.5344>
- Lantu, F. T., Pangkey, R. I. J., & Sumampouw, O. (2023). Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, 4(1).
- Manik, S. P., & Juwono, V. (2024). Strategi Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Studi pada Kementerian Keuangan. Brilliant: Jurnal Riset dan Konseptual, 9(1), 1. <https://doi.org/10.28926/briliant.v9i1.1623>

- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Praditya, D. (n.d.). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa. BPPKI Bandung: *Jurnal Komunikasi dan Informatika Publik*.
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61-80. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Good Governance. *Lex LATA*, 5(2), 218-239. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 184-205. <https://doi.org/10.21002/jaki.2013.10>
- Tulungen, E. E., Saerang, D. P., & Maramis, J. B. (2022). Digital Transformation: Role of Digital Leadership. *Jurnal EMBA*, 10(2), 1116-1123.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Utama, A. A. G. S. (2020). The Implementation of E-Government in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(7), 190-196. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.929>
- Vitriana, N., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *DIGIBIS: Digital Business Journal*, 1(1). <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis>